

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam suatu hubungan yang sah dan diridhoi oleh Allah SWT. Perkawinan merupakan salah satu pelaksanaan syariat Islam yang terutama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna.<sup>1</sup> Allah SWT berfirman dalam QS. Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum [30]: 21)<sup>2</sup>*

Perkawinan juga merupakan suatu peristiwa yang penting dalam kehidupan bersama antara sesama manusia yang berlainan jenis untuk mewujudkan kesatuan rumah tangga dalam kehidupan suami istri. Sebuah perkawinan memiliki tujuan yang luhur, oleh sebab itu diterbitkannya

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan

<sup>1</sup> Laurensius Mamahit, *Artikel skripsi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia*. Manado: Universitas Sam Ratulangi, 2013

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, 2011, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Dilengkapi Dengan Kajian Usul Fiqih dan Intisari Ayat*, Bandung: Sygma Publishing, hlm. 406

Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam.<sup>3</sup>

Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan telah mengatur masalah perkawinan di dalam al-Qur'an dan Hadits juga Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan PP Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam seperti yang telah disebutkan di atas. Kendatipun demikian, dalam perkembangan zaman yang semakin maju pesat, teknologi yang semakin canggih, ilmu pengetahuan yang semakin luas dan mumpuni membuat kebanyakan orang justru semakin berfikir mundur, dan semakin jauh dari kata menaati peraturan. Ironinya, kita dapat melihat cerminannya dari perilaku pasangan-pasangan remaja maupun dewasa yang justru banyak bertindak tanpa berfikir. Hanya ikut-ikutan trend yang sedang bergejolak dan mengatasnamakan gengsi bila tidak melakukan hal yang sama.

Kemajuan teknologi yang semakin canggih justru digunakan untuk mengumbar kemesraan dengan kekasih yang belum terikat dengan perkawinan yang sah (berpacaran), dan digunakan untuk mengakses situs-situs *porno* yang pada akhirnya timbullah keingintahuan dan rasa penasaran ingin melakukan apa yang sudah dilihat serta hasrat yang disalurkan bukan pada tempatnya. Inilah yang dari tahun ke tahun bukan semakin berkurang, akan tetapi semakin meningkat, yakni maraknya perilaku seks bebas dikalangan remaja dan/atau muda-mudi.

---

<sup>3</sup> Mohd. Idris Ramulyo, 1996, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, hlm. 27

Kebanyakan dari para remaja dan/atau muda mudi tersebut hanya memikirkan kenikmatan sesaat, tanpa sadar dan tidak memikirkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya. Salah satu akibat dari perilaku seks bebas tersebut adalah hamil di luar nikah dan akhirnya harus “*terpaksa*” menikah untuk menetapkan status sang anak ketika nanti anak tersebut telah lahir.<sup>4</sup>

Dari adanya *Married by Accident* dan kelahiran anak tersebut akhirnya menimbulkan suatu konflik mengenai status sang anak, karena kelahiran merupakan sebuah peristiwa hukum yang menimbulkan banyak akibat hukum. Salah satunya adalah hubungan perwalian, karena seorang anak yang lahir sebagai suatu akibat dari hubungan biologis yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan hanya akan menyandang diantara 2 (dua) status dan kedudukan di mata hukum, yakni sebagai anak sah atau sebagai anak luar nikah (di dalam Hukum Islam disebut anak zina).<sup>5</sup> Dan hal ini akan sangat berpengaruh bagi sang anak ketika kemudian hari akan menikah untuk menentukan yang berhak menjadi wali nikah untuk menikahnya.

Di Indonesia sendiri mengenai status anak diatur di dalam Hukum Positif yakni UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Di dalam Pasal 42 UU Perkawinan menyatakan :

“Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.”

---

<sup>4</sup> Enik Isnaini, 2013, *Kedudukan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Karena Kawin Hamil (Married By Accident) Di Tinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Perdata*, Jurnal Independent Volume 2, Lamongan

<sup>5</sup> Haima Najachatul Mukarromah, 2015, *Proses Pelaksanaan Perwalian Anak Luar Nikah Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif Di KUA Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri*, Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bab I hlm 3

Pasal 43 UU Perkawinan yang sekarang telah dicabut dan dirubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan :

“anak luar nikah diakui juga sebagai anak yang sah dan mempunyai nasab dan hubungan waris dengan bapak biologisnya.”

Dan di dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyatakan :

“anak sah” adalah :

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- b. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Di dalam Hukum Islam mengenai status anak sah memiliki makna yang tidak berbeda dengan UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yaitu anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam dan akibat dari perkawinan yang sah. Sedangkan yang dimaksud dengan anak luar nikah adalah anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar pernikahan yang sah. Hanya saja Hukum Islam memandang anak luar nikah kedudukannya sama dengan anak zina.

Begitu juga mengenai status anak yang pembuahannya terjadi sebelum adanya suatu pernikahan, akan tetapi anak tersebut lahir di dalam pernikahan yang sah, terdapat perbedaan dari sudut pandang Hukum Islam. Jika di dalam Hukum Positif menyatakan bahwa status anak tersebut adalah anak sah berdasarkan Pasal 42 UU Perkawinan dan Pasal 99 KHI, maka di dalam Hukum Islam, status anak tersebut termasuk anak zina berdasarkan pendapat dari Imam Madzhab yang empat.

Permasalahan akan kembali muncul jika anak yang telah lahir tersebut kemudian hari akan menikah, penetapan mengenai yang paling berhak menjadi wali nikah untuk menikahnya juga masih terdapat perbedaan pendapat. Apabila status dan kedudukannya adalah anak sah, yang pembuahan dan kelahiran terjadi di dalam pernikahan yang sah, maka tidak terdapat masalah. Maka ayah biologisnya dapat menjadi wali nikah untuk menikahkan anaknya. Berbeda jika pembuahannya sebelum terjadi pernikahan, dan kelahiran terjadi di dalam pernikahan, meskipun ayah biologis sekalipun bisa saja tidak dapat menjadi wali nikah untuk menikahkan anaknya karena beberapa alasan. Di dalam Hukum Islam anak luar nikah/ anak zina hanya bernasab pada ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan di dalam Hukum Positif, tepatnya berdasarkan Putusan MK anak luar kawin, dapat dinasabkan dengan ayah biologisnya.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka menjadi dasar bagi penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Analisis Pelaksanaan Penetapan Wali Nikah Terhadap Anak Hasil Kawin Hamil di Luar Nikah (Studi Di KUA Kecamatan Dau Kabupaten Malang).”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana persepsi Pejabat KUA tentang siapa yang berhak menjadi wali nikah bagi anak hasil kawin hamil di KUA Kecamatan Dau Kabupaten Malang?

2. Apa dasar hukum yang digunakan Kepala KUA Kecamatan Dau Kabupaten Malang dalam menetapkan wali nikah bagi anak hasil kawin hamil?
3. Bagaimana pelaksanaan penetapan wali nikah bagi anak hasil kawin hamil di luar nikah di KUA Kecamatan Dau Kabupaten Malang?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui persepsi Pejabat KUA tentang siapa yang berhak menjadi wali nikah bagi anak hasil kawin hamil di KUA Kecamatan Dau Kabupaten Malang.
2. Untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan Kepala KUA Kecamatan Dau Kabupaten Malang dalam menentukan wali nikah bagi anak hasil kawin hamil.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan penetapan wali nikah bagi anak hasil kawin hamil di KUA Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum Perdata dan hukum Islam juga sebagai bahan masukan dan referensi bagi penelitian selanjutnya.

## 2. Manfaat praktis

### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana dalam bidang Hukum Islam dan Hukum Positif. Serta sebagai tambahan wawasan mengenai siapa yang paling berhak menjadi wali nikah bagi anak hasil kawin hamil yang dikemudian hari akan menikah berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif dan untuk selanjutnya peneliti akan menerapkan ilmu-ilmu yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian diterapkan dalam praktek.

### b. Bagi Instansi Terkait:

Sebagai perbendaharaan di perpustakaan yang dimungkinkan dapat dipakai sebagai referensi atau masukan dan untuk pemecahan masalah yang terkait dengan siapa yang berhak menjadi wali nikah bagi anak hasil kawin hamil yang dikemudian hari akan menikah berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif.

## E. Metode Penelitian

Dalam menelusuri dan memahami objek penelitian ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini digolongkan dalam penelitian lapangan/yuridis sosiologis (*Field Research/Socio Legal Research*), yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis dan

bahan-bahan hukum yang lainnya yang merupakan data, selain itu juga untuk melihat penerapannya atau pelaksanaannya dalam masyarakat melalui penelitian lapangan, juga bisa dilakukan dengan meninjau, melihat, serta menganalisis masalah dengan menggunakan pendekatan pada prinsip-prinsip dan asas-asas hukum.<sup>6</sup>

Dalam hal ini penulis menerapkan penelitian lapangan/yuridis sosiologis tersebut dengan pengumpulan dan peninjauan data secara langsung di KUA Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

## 2. Jenis Data

### a. Data Primer

Data primer adalah jenis data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.<sup>7</sup> Sumber data pada penelitian ini yaitu:

- 1) Hasil wawancara dengan responden terkait; dan
- 2) Dokumen-dokumen dan/atau data-data yang penulis peroleh dari KUA yang berhubungan dengan masalah penelitian dalam penetapan wali nikah bagi anak hasil kawin hamil di luar nikah di KUA Dau Kabupaten Malang.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kajian kepustakaan dan undang-undang, buku-buku literatur maupun hasil

---

<sup>6</sup> Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, hal 12

<sup>7</sup> Pedoman penulisan hukum, 2012, Fakultas Hukum, UMM, hal 18



penelitian terdahulu sebagai acuan tambahan penulis.<sup>8</sup> Sumber data yang terkait antara lain :

- a) UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan
- b) Al-Qur an dan As-Sunnah
- c) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975
- d) Kompilasi Hukum Islam

c. Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang diperoleh dari ensiklopedia, jurnal dan kamus-kamus hukum.<sup>9</sup>

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Interview/Wawancara

Yakni proses pengumpulan data dengan jalan mengadakan dialog atau tanya jawab secara langsung antara dua orang bertahap-tahap secara fisik melalui orang-orang tertentu yang dianggap dapat memberikan data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op cit*, hlm 161

### 1) Purposive Sampling

Purposive Sampling adalah penentuan sampel oleh peneliti secara subyektif dengan anggapan bahwa sampel yang diambil tersebut mencerminkan (representative) bagi penelitiannya.<sup>11</sup> Dalam hal ini penulis menentukan sendiri sampel yang akan diambil karena ada pertimbangan dan alasan tertentu. Sampel di dalam penelitian ini diambil melalui interview/wawancara yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan wawancara secara langsung dengan Kepala KUA Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

- b. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan lain sebagainya.<sup>12</sup> Dalam hal ini penulis gunakan untuk mengumpulkan data dengan melihat dokumen atau catatan yang ada pada KUA Kecamatan Dau Kabupaten Malang, yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan dengan tujuan agar dokumen-dokumen tersebut dapat membantu dalam memecahkan masalah-masalah dalam penelitian.

---

<sup>11</sup> Muslan Abdurrahman, 2009, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMM Press, hlm 109

<sup>12</sup> Suharsimi Arikunto dalam skripsi Dedy Roehan Asfia, 1999, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Yogyakarta: Rineka Cipta, hlm. 206

#### 4. Metode Analisa Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisa data yaitu analisa data deskriptif kualitatif, yaitu memberikan predikat kepada variabel yang diteliti sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Predikat yang diberikan tersebut dalam bentuk predikat yang sebanding dengan atau atas dasar kondisi yang diinginkan.<sup>13</sup>

Melalui analisa data deskriptif kualitatif ini penulis akan menggambarkan hasil pengumpulan dan peninjauan data yang didapat dari penelitian lapangan mengenai siapa yang berhak untuk menjadi wali nikah bagi anak perempuan yang akan menikah hasil dari kawin hamil dan menganalisis dasar hukum yang digunakan oleh KUA Kecamatan Dau Kabupaten Malang serta hasil dari persepsi Hakim berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif.

#### **F. Rencana Sistematika Penulisan**

Penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab yang masing-masing akan menguraikan tentang :

##### **BAB I                      PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan/Penelitian, Manfaat Penulisan/Penelitian, Metode Penulisan/Penelitian Hukum, dan Sistematika Penulisan.

---

<sup>13</sup> Suharsimi Arikunto dalam Skripsi Dedy Roehan Asfia, 1990, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 353

## **BAB II                    TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini akan mengungkapkan landasan-landasan teori yang digunakan dan menjadi acuan bagi penulis dalam menyusun skripsi. Selain itu diuraikan pula mengenai buku-buku yang relevan dan berhubungan untuk pembahasan masalah yang dikaji dalam skripsi ini.

## **BAB III                  HASIL ANALISA DATA ATAU PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan hal-hal yang berhubungan dengan seluruh hasil penelitian yang diperoleh penulis. Di dalamnya berisi tentang analisis dan pemecahan masalah yang dikaji dalam skripsi ini.

## **BAB IV                  PENUTUP**

Pada bab ini akan dikemukakan kesimpulan dari penelitian yang telah dilaksanakan beserta saran untuk masalah dalam penelitian ini.